KOTA SURABAYA

RENCANA KERJA TAHUNAN

BNN KOTA SURABAYA

TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA

ALAMAT : Jl. Ngagel Madya V no. 22 Surabaya
TELP/FAX : 031 – 5024835
EMAIL : bnnkotasurabaya@gmail.com
WEBSITE : www.bnnkotasurabaya.com

RENCANA KERJA TAHUNAN

KOTA SURABAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Ngagel Madya V No. 22, Surabaya. Telp : 031-5024835, Humas : 081358784535

IG : infobnn_kota_surabaya Website : surabayakota.bnn.go.id Email : bnnksby@gmail.com

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha maksimal yang telah dilakukan Pejabat / Staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan kerjasama yang baik, Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun 2024 dapat disusun dan terselesaikan. Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun 2024 dokumen perencanaan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja pada tahun anggaran 2024.

Dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun 2024 disampaikan rencana program, kegiatan dan target yang hendak dicapai serta kebutuhan pendanaan dalam Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan dukungan dari pihak terkait dalam rangka mencapai target sasaran kegiatan dan indikator kerja guna mewujudkan visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Kami berharap Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kerja BNN Kota Surabaya tahun 2024. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pejabat dan staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya selama tahun 2024 yang telah mendukung terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban diucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, Desember 2023

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional

Kota Surabaya

Noer Wisnanto, S.I.K.

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN pada periode 2020-2024. Pada perkembanganya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini.

Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

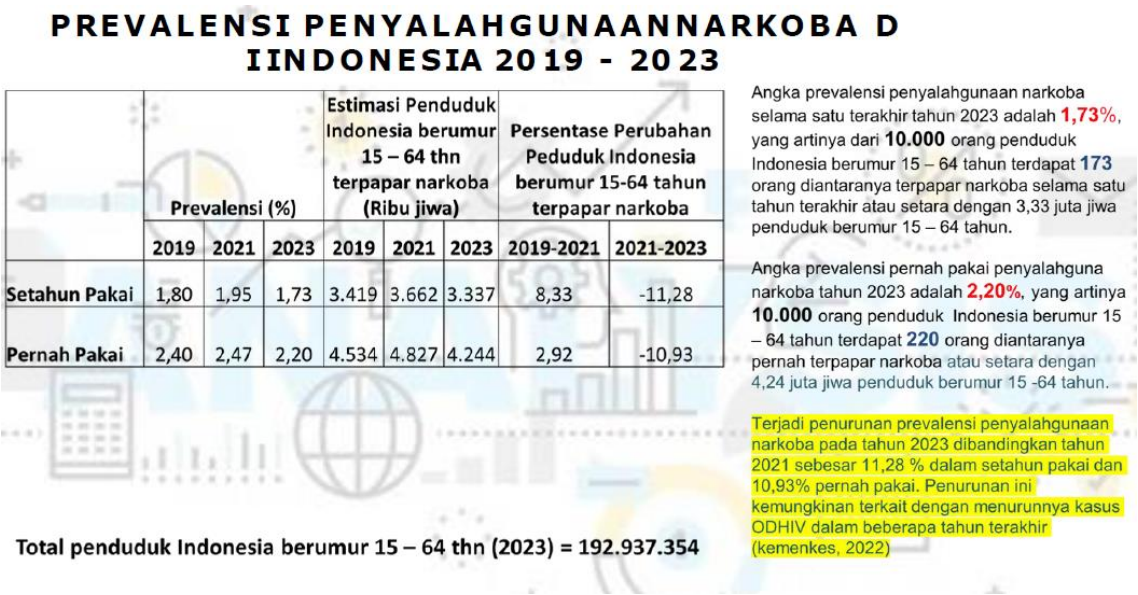

Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Sumber : Hasil Penelitian BNN tahun 2023

Dari data tersebut, angka prevalensi penyalah guna Narkoba mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka prevalensi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Namun meskipun mengalami penurunan, jika dilihat dari angka prevalensi tahun 2023, masih terdapat sekitar 3,33 juta jiwa yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan statusi yang dilabeli sebagai situasi "darurat narkoba".

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai Leading Sektor masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya.

Kota Surabaya merupakan Kota metropolis kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara 7° 9'- 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur.W ilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan

Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Secara Topografi Kota Surabaya 80% dataran rendah, dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.

Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim Kemarau terjadi antara bulan Mei – Oktober dan musim hujan terjadi antara bulan November – April. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan rata2 = 26,70 m3/detik, Kali Mas dengan Q rata2 = 6,26 m3/detik dan Kali Jagir dengan Qrata2 = 7,06 m3/detik. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 154 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Penduduk surabaya sebanyak 3.095.026 jiwa dan ditambah jumlah pekerja dari luar kota lebih dari 750 ribu jiwa. Sedangkan dalam bidang Pendidikan formal, di Surabaya terdapat 2.638 PAUD/TK dengan jumlah peserta didik 99.233 anak, 637 Sekolah Dasar dengan jumlah peserta didik 233.814 siswa, 310 Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah peserta didik sebanyak 111.973 siswa, 129 SMA dengan jumlah peserta didik sebanyak 56.079 siswa, 106 SMK dengan jumlah peserta didik sebanyak 59.728 siswa. Ditambah jumlah Perguruan Tinggi yang memiliki lebih dari 100.000 mahasiswa, Selain Pendidikan format tersebut terdapat juga pendidikan non formal, antara lain pondok pesantren,

Tempat Pendidikan Al Qur'an atau tempat pendidikan non formal lainnya. Selain itu di Surabaya juga terdapat perusahaan industri, tempat hiburan, pengusaha permakanan, mall / tempat pembelanjaan modern dan banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini.

Dalam beberapa tahun terakhir Surabaya mengalami perluasan ekonomi, dan akibatnya banyak penduduknya yang masuk kota Surabaya untuk bekerja, atau sebaliknya. Banyak kota-kota satelit kelas menengah dan kelas atas sedang dan telah dikembangkan di Surabaya, lengkap dengan pusat perbelanjaan, sekolah swasta dan mini market. Pemerintah mengembangkan sistem / pengaturan jalan untuk mengakomodasikan arus lalu lintas yang semakin banyak ke dan dari Surabaya.

Surabaya memiliki Pelabuhan besar di Tanjung perak dan berdekatan dengan bandara Juanda merupakan kota dengan posisi yang sangat strategis dalam segala bidang termasuk transportasi, maka disamping berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di Kota Surabaya, juga sekaligus menjadi faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial termasuk permasalahan Narkotika. Dengan demikian, atas kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan yang terpadu untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya aktivitas penyelendupan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Surabaya.

BNN Kota Surabaya melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan berbagai kegiatan melalui Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi dan Fungksi Pemberantasan. Melalui fungsi tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen / komponen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Fungsi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Fungsi Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Fungsi Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Kinerja suatu organisasi pastinya didukung oleh sumber daya manusia

(SDM) yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting yang merupakan kunci sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai visi dan misi BNN Kota Surabaya. Adapun secara keseluruhan komposisi SDM pada BNN Kota Surabaya dan jajaran pada T.A. 2023 adalah sebagai berikut :

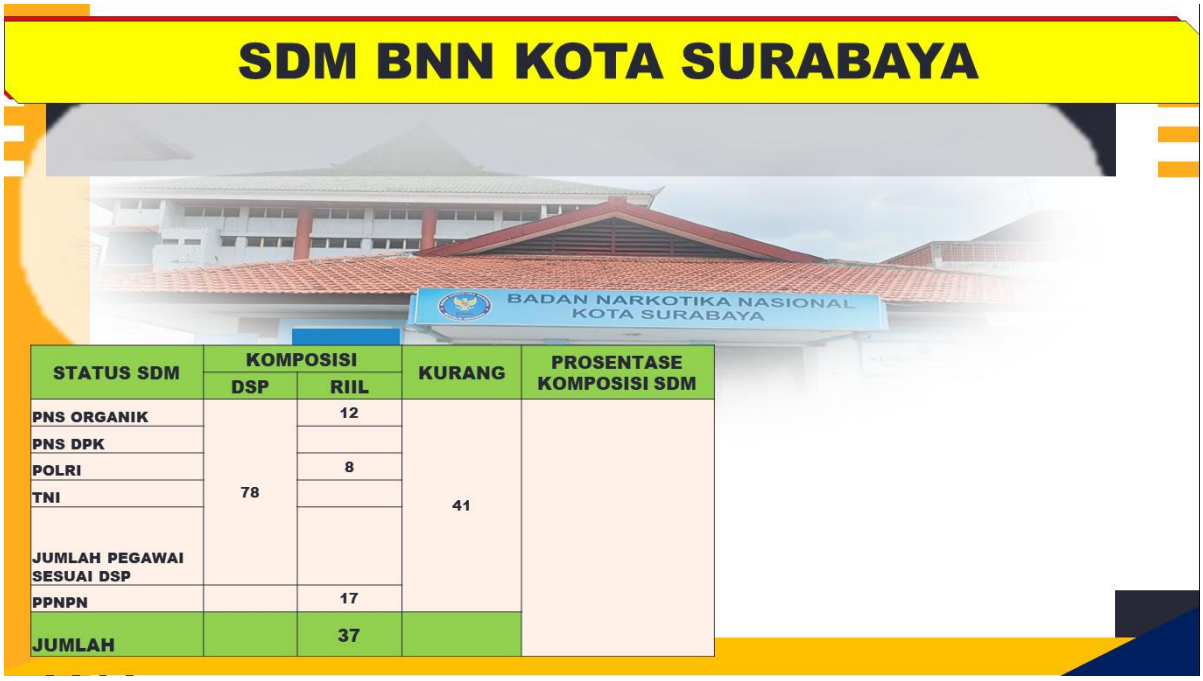

STATUS SDM	KOMPOSISI		KURANG	PROSENTASE KOMPOSISI SDM
	DSP	RIIL		
PNS ORGANIK	78	12	41	
PNS DPK				
POLRI		8		
TNI				
JUMLAH PEGAWAI SESUAI DSP				
PPNPN		17		
JUMLAH		37		

B. KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI

Kondisi capaian kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan digunakan sebagai dasar penyususnan Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024.

Pada tahun 2023 Kepala BNN Provinsi Jawa Timur dan Kepala BNN Kota Surabaya telah sepakat bersama bahwa Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja BNN Kota Surabaya adalah sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja. Tabel berikut menjelaskan target dan realiasi sasaran kinerja tahun 2023 BNN Kota Surabaya, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks	53,88 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgu- naan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks	82,411 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks	3.275 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	90,35 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	6 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.20 Indeks	3,43 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	87,96 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,69 Indeks

Dari capaian pengukuran Dektari pada tahun 2023, capaian BNN Kota Surabaya mengalami peningkatan, pada tahun 2022 mencapai indeks 52.40 dari target indeks 52,00 atau dengan capaian 100,77%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai indeks 53,88 (tinggi) dari target 53,00 (tinggi) atau dengan capaian 101,66%.

Adapun faktor pendukung dalam mencapai kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Pelaksanaan Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN oleh BNN Kota Surabaya dengan masif antara lain : melalui Talk Show atau tatap muka, media cetak, perubahan pesan P4GN di Billboard BNN Kota Surabaya, medi elektronik dan pemasangan brading sarana publik "War On Drugs" di taman Komjen M. Duriat Surabaya.
3. Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dan lembaga terkait serta masyarakat terhadap pelaksanaan P4GN antara lain : penyediaan sarana prasarana, pemasangan spanduk P4GN, dan pelaksanaan sosialisasi di OPD, sekolah, kampus atau lembaga masing-masing serta di lingkungan masyarakat dengan menghadirkan Narasumber BNN Kota Surabaya.

Capaian kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNN Kota Surabaya tahun 2023 dapat tercapai dengan capaian 104,728%. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan yakni pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai mencapai indeks 87,143 dari target indeks 78,68 atau dengan capaian 110,756%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai indeks 82,411 (tinggi) dari target 78,69 (tinggi) atau dengan capaian 104,728%.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kota Surabaya tahun 2023 sesuai dengan hasil penghitungan rumus Nasional dengan capaian indeks 3,275 (Mandiri) dari target 3,25 (Mandiri). Program pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti Narkoba di BNN Kota Surabaya dilaksanakan dengan sasaran Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat diarahkan untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KoTAN). Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan

program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya Kota Surabaya karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan KoTAN ini, peran serta Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba di Kota Surabaya.

Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang diukur dari mulai mengikuti rehabilitasi dan selesai rehabilitasi. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung peningkatan kualitas hidup klien rehabilitasi rawat jalan dari awal mengikuti rehabilitasi dan selesai rehabilitasi menggunakan formulir WHO-QoL.

Untuk mendukung indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, BNN Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya kegiatan antara lain :

1. Pembentukan Unit IBM di 2 Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk unit IBM di kelurahan yang SK tim Agen Pemulihan (AP) dikeluarkan oleh Lurah setempat.
2. Bimbingan teknis petugas IBM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan materi dan kompetensi kepada Agen Pemulihan yang akan bertugas sebagai tim di unit IBM.
3. Penunjukan unit IBM disesuaikan dengan program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) yakni di Kelurahan Kedungdoro dan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan fasilitas layanan, BNN Kota Surabaya melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui pelaksanaan standardisasi lembaga rehabilitasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022. Target kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tahun anggaran 2023 dapat tercapai sebanyak 6 (enam) Lembaga dari target 5

(lima) Lembaga. Capaian ini ditandai dengan 6 (enam) lembaga tersebut telah melaksanakan layanan rehabilitasi Narkoba baik rawat jalan maupun rawat inap.

Target kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional tahun anggaran 2023 dapat tercapai sebanyak 2 (dua) unit dari target 2 (dua) unit. Capaian ini ditandai dengan adanya 2 (dua) unit IBM yang telah beroperasi yakni melakukan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada orang yang rentan atau rawan penyalahgunaan Narkoba dan sudah melakukan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkoba dengan skoring DAST-10 pada skor 0 - 1. Dua unit IBM tersebut telah dilakukan penilaian oleh Deputi Rehabilitasi BNN dengan hasil fase PRIMA sesuai surat Direktur Penguatan Lembaga Rehabitasi Komponen Masyarakat nomor B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023.

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (klien) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi di BNN Kota Surabaya. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada klien dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. BNN Kota Surabaya selama tahun 2023 telah menangani sebanyak 6 (enam) laporan kasus narkotika.

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukungan pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sasaran kinerja terselenggaranya proses menajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain sebagai berikut

: Penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat. Capaian NKA BNN Kota Surabaya tahun 2023 adalah 87.96 Indeks atau dengan capaian 101,10%. Sedangkan capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surabaya dapat ditunjukkan di aplikasi SPANINT MONEV PA KEMENKEU dimana realisasi IKPA BNN Kota Surabaya tahun 2023 adalah 98,69 Indeks dari target 92 Indeks atau dengan capaian adalah 107,27%.

C. IDENTIFIKASI POTENSI DAN TANTANGAN

Sebagaimana hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu diupayakan perbaikannya, antara lain :

a. Pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba masih memerlukan optimalisasi dalam monitoring serta evaluasinya.
b. Pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat dan kegiatan rehabilitasi masih memerlukan optimalisasi dalam monitoring serta evaluasinya sehingga dapat diketahui dampak pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
c. Pelaksanaan pelayanan Asesmen Terpadu masih memerlukan optimalisasi dalam hal dukungan anggaran, karena anggaran yang tersedia hanya mampu menampung kebutuhan sesuai target namun belum dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
d. Pelaksanaan program dukungan manajemen sebagai sarana meningkatkan operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan, baik dalam hal sarana dan prasarana, sumber daya manusia maupun dukungan administrasi pendanaan.

Guna meningkatkan kinerja BNN Kota Surabaya, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta pencapaian sasaran kegiatan, beberapa hal dapat diupayakan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.

2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti Narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya lebih dipersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang / jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
7. Perlu disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 BNN Kota Surabaya sangat membutuhkan tambahan anggaran khususnya dalam hal perawatan gedung kantor BNN Kota Surabaya dan operasional lainnya.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang memuat Visi, Misi Pemerintah. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, maka Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program,kegiatan dan komponen kegiatan.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

Proses perumusan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan bahwa arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden RI. Rumusan arah kebijakan mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kerja yang terukur.

Muatan atau substansi arah kebijakan BNN 2020-2024 dirumuskan secara seksama dan memperhatikan beberapa unsur perumusan, diantaranya adalah berikut :

1. Kesesuaian arah kebijakan sebagai upaya pencapaian visi misi Presiden dan sasaran nasional.
2. Kesesuaian arah kebijakan dengan isu strategis yang teridentifikasi untuk BNN dalam 5 (lima) tahun kedepan.

3. Kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya merumuskan visi tahun 2020-2024 “Mewujudkan masyarakat surabaya yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia indonesia yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang” dengan melaksanakan misi “Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Surabaya dalam upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika”.

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kota Surabaya dengan tujuan “Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kota Surabaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bidang P4GN di wilayah Kota Surabaya;
b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Surabaya;
c. Melaksanakan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Surabaya;
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Surabaya;
e. Pelayanan administrasi dan Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan BNN Kota Surabaya.

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Surabaya dirumuskan sesuai dengan kondisi permasalahan dan pilihan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sesuai konteks kewilayahan. Kebijakan dan

strategi operasional BNN Kota Surabaya tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan selaras dengan kebijakan BNN yang berorientasi penguatan pelaksanaan P4GN dan kapasitas organisasi BNN yang berfokus pada :

a. Penguatan Pengawasan Jalur Penyelundupan Narkoba
   Modus operasi yang digunakan sindikat beraneka ragam, oleh karena itu pengawasan jalur penyelundupan narkoba di Kota Surabaya perlu dikuatkan.

b. Peningkatan Kualitas Penindakan Kejahatan Narkoba
   Dalam upaya pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kota Surabaya, BNN Kota Surabaya juga melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

c. Pembangunan Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat
   BNN Kota Surabaya juga melalui program pemberdayaan masyarakat menggerakkan potensi komponen masyarakat baik itu tokoh masyarakat, agama, Pendidikan serta aktivis LSM untuk proaktif dalam melaksanakan kegiatan P4GN.

d. Peningkatan Kapabilitas Rehabilitasi
   Melaksanakan strategi kedepan dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional, strategi kedepan dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional, dan strategi kedepan dalam mengatasi kendala Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang menjalani Layanan Pascarehabilitasi.

e. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Stakeholder
   Tanggung jawab adanya penyalahgunaan narkotika beserta pencegahannya merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan para *stakeholder* yang ada, menyadarkan bahwa kegiatan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika bukan sekedar meliputi kegiatan preventif saja melainkan juga dapat dalam bentuk kegiatan yang

represif dan kuratif lainnya baik dalam ranah hukum, psikologi dan sosiologi. Untuk menyelamatkan generasi muda di Kota Surabaya dari bahaya narkoba perlu kerjasama sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Polri, TNI, swasta, para tokoh, masyarakat hingga lingkungan keluarga.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Surabaya. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Surabaya Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	**53.88 Indeks**	**Rp 80.000.000**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	**82.411 Indeks**	**Rp 106.000.000**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	**3.30 Indeks**	**Rp 211.695.000**
4.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	**68 %**	**Rp 9.985.000**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	**10 Orang**	**Rp 14.890.000**
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	**-**	**-**
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	**5 Lembaga**	**Rp 7.021.000**
			Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	**2 Unit**	**Rp 51.565.000**
		Meningkatnya kualitas layanan rehailitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	**3.29 Indeks**	**Rp 29.792.000**
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	**-**	**-**
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	**-**	**-**
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	**-**	**-**
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	**-**	**Rp 19.625.000**
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	**-**	**-**
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor	**-**	**-**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		dan prekursor narkotika	narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	**88 Indeks**	**Rp 4.171.000**
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	**-**	**-**
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	**98,79 Indeks**	**Rp 97.780.000**
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	**-**	**-**
					Rp 141.520.000
					Rp 11.440.000
					Rp 1.355.614.000
					Rp 10.000.000
				TOTAL	**Rp 2.151.098.000**

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN kota Surabaya Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Surabaya tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Surabaya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kota Surabaya, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	-	-	
				Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10	Orang	**Rp 80.000.000**
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	Keluarga	**Rp 40.000.000**
				Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2	Kelurahan	**Rp 66.000.000**
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2	Lembaga	**Rp 211.695.000**

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
4.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan	15	Orang	**Rp 9.985.000**
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10	Orang	**Rp 14.890.000**
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	-		
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	Lembaga rehabilitasi yang operasional	5	Lembaga	**Rp 7.021.000**
				Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-		
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional	2	Unit	**Rp 51.565.000**

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		Meningkatnya kualitas layanan rehailitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	15	Orang	**Rp 29.792.000**
				Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	610	Orang	**Rp 141.520.000**
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	-		
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	-		
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-		
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	5	Orang	**Rp 19.625.000**
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	-		

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	**Rp 300.000**
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen	**Rp 3.871.000**
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen	**Rp 1.320.000**
				Layanan Perkantoran	12	Layanan	**Rp 96.460.000**